



CALK

SEMESTER II

(AUDITED)

TA 2025

Stasiun PSDKP Pontianak

Jl. Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kec.
Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SKDP Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kubu Raya, 31 Desember 2025
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19850616 200701 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	77
VI. Lampiran dan Daftar	

STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
JL Dr. Moh Hatta, Sui Rengas, Kec. Sui Kakap, Kab. Kubu Raya, Kalbar
TELEPON (0561) 773321, FAXIMILE (0561) 773321

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Uudited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kubu Raya, 31 Desember 2025
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,



Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19850616 200701 1 003

Laporan Keuangan Stasiun PSKDP Pontianak Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 9,559,688

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp 30,490,283,123 atau mencapai 92,13 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 33,094,067,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 37,352,688,307; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 709,325,711; Aset Tetap (neto) sebesar Rp36.092,977,596; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp550,385,000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp37,352,688,307

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp320, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 30,558,715,578 sehingga terdapat Defisit

dari

Kegiatan Operasional senilai (Rp 30,549,155,154). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 9,560,424 dan sebesar (Rp30,549,155,154) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp30,549,155,154).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp39.721.512.356 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp346,677,348) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0, Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0, Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0 serta koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai (Rp346,677,348) Koreksi lain – lain Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp346,677,348 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 39,266,362,250

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		9.560.424		13.206.796
JUMLAH PENDAPATAN		-	9.560.424	0,00	13.206.796
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	12.216.436.000	12.206.037.947		12.076.248.406
Belanja Barang	B.4	19.608.012.000	17.014.836.776		26.412.641.839
Belanja Modal	B.5	1.269.619.000	1.269.408.400		2.480.931.333
JUMLAH BELANJA		33.094.067.000	30.490.283.123	92,13	40.969.821.578

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	709.325.711	797.126.246
Jumlah Aset Lancar		709.325.711	797.126.246
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11.836.746.000	11.836.746.000
Peralatan dan Mesin	C.15	61.416.762.554	60.109.804.498
Gedung dan Bangunan	C.16	14.586.826.318	14.402.001.836
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	22.494.291.923	22.153.264.709
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	647.298.080
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(72.285.040.385)	(70.160.999.653)
Jumlah Aset Tetap		38.049.586.410	38.988.115.470
ASET LAINNYA			
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.21	550.385.000	1.060.878.000
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		550.385.000	1.060.878.000
JUMLAH ASET			
		39.309.297.121	40.846.119.716
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	42.934.871	1.124.607.360
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		42.934.871	1.124.607.360
JUMLAH KEWAJIBAN			
		42.934.871	1.124.607.360
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.28	39.266.362.250	39.721.512.356
JUMLAH EKUITAS DANA			
		39.266.362.250	39.721.512.356
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		39.309.297.121	40.846.119.716

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak			-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.182.144.161	12.100.142.192
Beban Persediaan	D.3	75.002.500	220.149.822
Beban Barang dan Jasa	D.4	13.774.735.982	16.125.720.001
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	2.020.128.194	6.522.392.242
Beban Perjalanan Dinas	D.6	685.484.932	3.488.434.132
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.821.219.809	3.721.932.618
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		30.558.715.578	42.178.771.007
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(30.558.715.578)	(24.543.384.055)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		9.559.688	9.318.828
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		736	48
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		9.560.424	9.318.876
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(30.549.155.154)	(24.534.065.179)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(30.549.155.154)	(24.534.065.179)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	39.721.512.356	41.153.798.446
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(30.506.220.283)	(42.227.001.255)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	346.677.348	169.228.376
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI PERSEDIAAN	E.3.4		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	(346.677.348)	(169.247.805)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7		19.438
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	30.440.682.396	40.963.943.532
EKUITAS AKHIR	E.5	39.309.297.121	39.721.512.356

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di amanahkan adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Pontianak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”**

Sedangkan Misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab

d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2025 salah satu yang diamanatkan adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Disamping itu, terdapat pula arahan untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; serta
2. Pembinaan (penataan) nelayan lokal

UPT Stasiun PSDKP Pontianak melalui SK Keputusan Direktur Jenderal PSDKP No.10/KEP-DJPSDKP/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Kapal Pengawas Perikanan Dirjen PSDKP di UPT terdapat 2 unit kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. *Speedboat* yang terdapat pada Stasiun PSDKP Pontianak berjumlah 5 unit yaitu Napoleon 003, Napoleon 037, Napoleon 038, TB. 01, dan *Searider*. Pembelian BBM dengan menggunakan voucher dilakukan untuk Napoleon 037 dan *searider* yang diambil di SPBU yang berada di Pontianak dan Napoleon 038 yang dapat diambil di SPBU yang berada di Sambas.

Sampai dengan Semester II TA 2025 terdapat barang bukti berupa kapal ikan asing sebanyak 16 kapal yang terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak dengan rincian:

- 3 kapal BMKT yang masih tahap proses somasi

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

- 1 kapal yang dihibahkan ke UNDIP
- 2 kapal yang dihibahkan ke BPRSDM
- 2 kapal yang dihibahkan ke KKP, dan
- 7 kapal kasasi yang dititipkan
- 1 Perahu fiber bermesin titipan kejaksaan

Jumlah pegawai negeri sipil Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 73 orang yang terdiri dari Golongan IV 1 orang Golongan III sebanyak 59 orang golongan II sebanyak 13 orang, untuk tenaga PPPK Golongan IX sebanyak 6 orang, golongan VII sebanyak 5 orang golongan V sebanyak 7 orang. Dan untuk tenaga PPNPN sebanyak 23 orang dan untuk tenaga PJLP sebanyak 24 orang. dengan rincian pegawai sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	Pegawai Kontrak		PPPK	Jumlah
			PPNPN	PJLP		
1	Stasiun PSDKP Pontianak	27	9	13	8	57
	KP. Hiu Macan 01	12	-	-	3	12
	KP. Hiu 11	8	-	-	2	8
2	Wilker PSDKP Sungai Rengas	2	2	-	1	4
3	Wilker PSDKP Mempawah	1	2	-	-	3
4	Wilker PSDKP Entikong	1	2	1	-	4
5	Wilker PSDKP Kapuas Hulu	2	1	1	-	4
6	Satwas SDKP Sambas	5	1	2	1	8
7	Wilker PSDKP Singkawang	1	1	-	-	2
8	Wilker PSDKP Jagoibabang	1	1	-	-	2
9	Wilker PSDKP Selakau	1	-	-	1	1
10	Wilker PSDKP Sajingan	0	1	-	-	1
11	Satwas SDKP Kayong Utara	4	2	-	-	6
12	Wilker PSDKP Ketapang	2	-	-	1	2
13	Satwas SDKP Kotawaringin Barat	3	1	1	-	5
14	Wilker PSDKP Seruyan	2	-	-	1	2
Total		72	23	18	18	121

Pada anggaran tahun 2025 terdapat kegiatan yang merupakan Prioritas Nasional yaitu;

- Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan (2350) dengan RO:

- Operasi Kapal Pengawas,
 - Operasi Speedboat Pengawas,
 - Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun, dan
 - Armada Pengawasan SDKP yang dirawat.
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan (2352) dengan RO:
- Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 - Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- Kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (2353) dengan RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan

neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan

nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	10%

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

	Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
Macet	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada

Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.

Akrual

Pertama Kali

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak memiliki nomor DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2025 tanggal 02 Desember 2025 dengan nomor digital stamp 3261-4542-7322-8205. Selama Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 5 (lima) kali. Rincian anggaran belanja Stasiun PSDKP Pontianak 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	9.560.424
Pendapatan Lain - Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	9.560.424
Belanja		
Belanja Pegawai	11.669.759.000	12.216.436.000
Belanja Barang	24.001.805.000	19.608.012.000
Belanja Modal	292.450.000	1.269.619.000
Jumlah Belanja	35.964.014.000	33.094.067.000

Pada awal tahun 2025 terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp8.265.448.000 dengan rincian Rp6.839.243.000 disebabkan belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri keuangan terkait pagu PNBPN dan Rp. 1.426.205.000 disebabkan anggaran tidak tertampung di rincian operasional teknis karena index SBKK.

Kode Kegiatan	Pagu	Blokir Semula	
		Kode 2	Kode A
	35.964.014.000	6.839.243.000	1.426.205.000
2350	16.233.544.000	6.727.488.000	456.527.000
2351	256.615.000	-	84.426.000
2352	892.537.000	111.755.000	464.235.000
2353	400.000.000	-	70.368.000
2355	18.181.318.000	-	350.649.000

Rincian Revisi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Revisi ke 1 tanggal 21 Februari 2025 dengan *digital stamp*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

DS: 0081-8291-0157-8083 sesuai dengan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal di atas yang merujuk kepada Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Nomor S-27/PB/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, maka setiap Unit Kerja Eselon I lingkungan KKP untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran tahun 2025 maka stasiun psdkp Pontianak melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp16.758.688.000 dengan rincian Rp2.423.803.000 disebabkan belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri keuangan terkait pagu PNBPN dan Rp14.334.885.000 disebabkan kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Pagu	Blokir Semula		Blokir Menjadi		Anggaran Yang Tidak Diblokir
		Kode 2	Kode A	Kode 2	Kode A	
	35.964.014.000	6.839.243.000	1.426.205.000	2.423.803.000	14.334.885.000	19.205.326.000
2350	16.233.544.000	6.727.488.000	456.527.000	2.423.803.000	9.549.075.000	4.260.666.000
2351	256.615.000	-	84.426.000	-	207.230.000	49.385.000
2352	892.537.000	111.755.000	464.235.000	-	786.857.000	105.680.000
2353	400.000.000	-	70.368.000	-	400.000.000	-
2355	18.181.318.000	-	350.649.000	-	3.391.723.000	14.789.595.000

- Revisi ke 2 tanggal 24 Maret 2025 dengan Digital Stamp DS: 3461-7080-1707-1207 yang merupakan revisi DJA berupa pergeseran anggaran 2350.999 (output cadangan)

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

sebesar Rp528.600.000 ke 2350.RCG (sarana bidang pertahanan kehutanan dan lingkungan hidup) serta pergeseran anggaran dari 2352.999 (output cadangan) ke anggaran 2352.QIC (pengawasan dan pengendalian Lembaga) Rp111.755.000

- Revisi ke 3 tanggal 14 April 2025 yang merupakan revisi DJA dengan digital stamp DS: 9300-0180-0577-2920 berupa buka blokir anggaran dengan nilai total blokir menjadi Rp12.101.653.000 dengan rincian Rp6.189.708.000 disebabkan belum dilengkapi dengan surat persetujuan Menteri keuangan terkait pagu PNPB dan Rp5.911.945.000 disebabkan kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya.

Kode Kegiatan	Pagu	Blokir Semula		Blokir Menjadi		Anggaran Yang Tidak Diblokir
		Kode 2	Kode A	Kode 2	Kode A	
	35.964.014.000	2.423.803.000	11.293.811.000	6.189.708.000	5.911.945.000	32.572.291.000
2350	16.233.544.000	2.423.803.000	9.549.075.000	6.189.708.000	1.404.000.000	16.233.544.000
2351	256.615.000	-	207.230.000		207.230.000	256.615.000
2352	892.537.000	-	786.857.000		786.857.000	892.537.000
2353	400.000.000	-	400.000.000		400.000.000	400.000.000
2355	18.181.318.000	-	350.649.000		3.113.858.000	14.789.595.000

- Revisi ke 4 tanggal 23 mei 2025 yang merupakan revisi DJA dengan DS: 3261-4542-7322-8205 berupa buka blokir anggaran PNPB sebesar Rp6.189.708.000 sehingga sisa blokir menjadi Rp5.911.945.000 kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	NAIK (TURUN) %
Belanja				
Belanja Pegawai	11.669.759.000	12.216.436.000	12.206.037.947	99,91
Belanja Barang	24.001.805.000	19.608.012.000	17.014.836.776	86,77
Belanja Modal	292.450.000	1.269.619.000	1.269.408.400	99,98
Jumlah Belanja	35.964.014.000	33.094.067.000	30.490.283.123	92,13

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

- Revisi ke 5 tanggal 30 Mei 2025 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000 serta pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.
- Revisi DIPA ke 6 pada tanggal 9 Juli 2025 merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 3261 4542 7322 8205 yaitu Revisi antar RO/pergeseran anggaran antar RO berupa penambahan Transportasi Lokal Perkara Kelautan dan Perikanan Yang Dikenakan Sanksi Pidana sebesar Rp1.020.000, penambahan pada Perjalanan Dinas, Penambahan perjalanan dinas dan transportasi lokal pada RO Unit Usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sebesar Rp4.520.000, penambahan Tunjangan Umum PPPK sebesar Rp7.560.000, pengiriman barang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp12.000.000 dan Atribut seragam serta plakat sebesar Rp10.500.000 dan Pemutakhiran/Perubahan Halaman 3 DIPA
- Revisi DIPA ke 7 pada tanggal 16 Oktober 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

stamp 3261 4542 7322 8205 yaitu Pergeseran anggaran dalam satu RO Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana berupa penambahan biaya Konsumsi Snack/Kudapan Penyidikan/Administrasi Penyidikan sebesar Rp750.000 dan Biaya Penyediaan keperluan awak tersangka/Kapal TPKP sebesar Rp150.000. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhannya berupa penambahan biaya perjalanan dinas dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan unit usaha sektor Sumber Daya Perikanan sebesar Rp1.660.000, Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait sebesar Rp2.010.000 dan transportasi lokal dalam rangka pengawasan lainnya sebesar Rp2.850.000 dan penyampaian Rencana Penarikan Dana.

- Revisi DIPA ke 8 pada tanggal 24 Oktober 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 4052 8134 1416 5320 yaitu Pergeseran anggaran dalam satu RO Operasi Kapal Pengawas berupa penambahan Listrik Darat Kapal Pengawas sebesar Rp20.040.000 dan penambahan Jamuan Tamu Kapal Pengawas sebesar Rp5.984.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Operasi Speedboat Pengawas berupa penambahan biaya Docking Speedboat Pengawas 12 Meter sebesar Rp25.328.000 dan penambahan Jamuan Tamu Kapal Pengawas sebesar Rp5.984.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat berupa penambahan Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Napoleon 037 sebesar Rp2.040.000, Perawatan Darurat Speedboat Pengawas

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

TB 01 sebesar Rp5.000.000 dan Perawatan Darurat Speedboat Pengawas Napoleon 037 sebesar Rp1.206.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan berupa penambahan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengamatan Rp5.240.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Layanan Perkantoran – Operasional dan Pemeliharaan Kantor berupa penambahan ATK dan Bahan Komputer sebesar Rp5.100.000, berupa penambahan biaya langgana telepon/internet sebesar Rp7.110.000, berupa penambahan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp11.333.000, , berupa penambahan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 sebesar Rp12.097.000.

- Revisi DIPA ke 9 pada tanggal 19 November 2025 yang merupakan revisi kewenangan DJA dengan digital stamp 9295 9202 1768 5309 yaitu revisi relaksasasi blokir dan penghapusan blokir dari DIPA yang semula pagu awal semula adalah 35.964.014.00 menjadi 33.094.067.000.
- Revisi DIPA ke 10 pada tanggal 9 Desember 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 9295 9202 1768 5309 yaitu Revisi pada Belanja Pegawai/51 berupa Penambahan Uang Lembur PNS sebesar Rp9.000.000, Penambahan Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp10.428.000, Penambahan Uang Lembur PPPK sebesar Rp5.068.000.
- Revisi DIPA ke 11 pada tanggal 11 Desember 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

stamp 9295 9202 1768 5309 yaitu Revisi Pemutakhiran Data POK Tahun Anggaran 2025 dan Revisi Antar RO pada Belanja EBA.994-002 berupa Penambahan Biaya Perawatan Laptop sebesar Rp1.740.000, Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 sebesar Rp4.719.000, Jaringan Internet dan CCTV sebesar Rp2.306.000

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 5 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai Rp16,834,497,000 dan realisasi sebesar Rp14,538,255,028 dengan rincian sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	15.224.287.000	12.928.688.920	84,92					
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	14.900.467.000	12.605.266.960	84,60	Operasi	63	63	100,00	
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	323.820.000	323.421.960	99,88	Operasi	10	10	100,00	
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.335.035.000	1.334.415.076	99,95					
2350.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	1.335.035.000	1.334.415.076	99,95	Unit	7	7	100,00	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	275.175.000	275.151.032	99,99					
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	90.401.000	90.380.784	99,98	Lembaga	20	22	110,00	
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	184.774.000	184.770.248	100,00	Lembaga	14	14	100,00	
2353.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		-	0					
TOTAL		16.834.497.000	14.538.255.028						

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

2. Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di Stasiun PSDKP Pontianak dengan pagu mencapai

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.RBQ	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,638,200,000	54,356,700	3.32					
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	1,638,200,000	54,356,700	3.32	Unit	1 Unit	0	-	
TOTAL		1,638,200,000	54,356,700	3.32					

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Realisasi
Pendapatan
Rp9.559.688

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.559.688. Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp 13.206.796, nilai realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 78.98%. Hal tersebut disebabkan terdapat nilai lelang dan pengembalian belanja pegawai tahun lalu lebih besar daripada tahun yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	9.559.688	9.318.828	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.887.648	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	320	0,00
Pendapatan Anggaran Lain - lain	736	-	0,00
Jumlah	9.560.424	13.206.796	-27,61

Realisasi pendapatan sebesar Rp9.559.688 dengan uraian:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp2.775.888 dengan rincian :
 - Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp2.775.888 dengan NTPN E83ACONAODEJ64SF dan NTB 097479705158 tanggal 22 Januari 2025 melalui risalah lelang nomor 9/11.01/2025-01 tanggal 20 Januari 2025.
- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp736 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00020A tanggal 13 Januari 2025 dan nomor SPM 00021A tanggal 14 Januari 2025.

Sampai dengan 31 Desember TA 2025 Stasiun PSDKP

Pontianak telah melaksanakan pemrosesan sanksi administratif, yang disetorkan langsung ke bendahara penerimaan Sekretariat Jenderal PSDKP. Penetapan denda administratif tersebut dilakukan terhadap:

- KM. Herry melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dan mendaratkan ikan tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan dengan jumlah denda administratif sebesar Rp32.175.000
- PT. Energi Unggul Persada melakukan pelanggaran administratif tidak memiliki perijinan berusaha terkait pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dengan jumlah denda administratif sebesar Rp28.470.000
- KM. Sumber Jaya melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp291.349.080
- PT. Chris Makmur Lestari (PD. CHRIS) melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau yang termasuk Appendiks CITES yang tidak memenuhi perizinan berusaha dengan jumlah denda administratif sebesar Rp159.600.000
- PT. Tri jaya Sempurna Sejati melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau yang termasuk Appendiks CITES yang tidak memenuhi perizinan berusaha dengan denda administratif sebesar Rp91.200.000
- PT GCL Indo Tenaga Pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) berupa instalasi Desalinasi tanpa memiliki Perizinann Berusaha dengan denda administratif sebesar Rp.312.206.400

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

- PT. AJK (Armada Jaya Khatulistiwa) Pemanfaatan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Perairan Kayong Utara dengan denda administratif sebesar Rp. 25.179.050
- KM. Diana Indah melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 38.700.000
- KM. Christina R melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 244.500.000
- KM. Mekar Jaya VIII melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 200.500.000
- KM. Sumber Arum melakukan pelanggaran Penangkapan Ikan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dibawah 30 Mill dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 200.000.000
- KM. Tambal Puung II melakukan pelanggaran dengan melakukan penangkapan ikan < 30 mil laut WPP 711 sehingga tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan pada perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan tidak mengaktifkan transmitter VMS secara terus menerus dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 200.000.000
- KM. Pistela Bahari melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 50.000.000

- KM. Nusa Belitong melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 50.000.000
- KM. Bangun Jaya Putri melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 250.000.000
- KM. Sinta Asih melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 200.000.000
- KM. Alin1 melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 50.000.000
- KM. Jaya Abadi 02 melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 250.000.000
- KM. Marina melakukan pelanggaran penangkapan ikan yang tidak sesuai perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dengan jumlah denda administratif sebesar Rp 100.000.000

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per

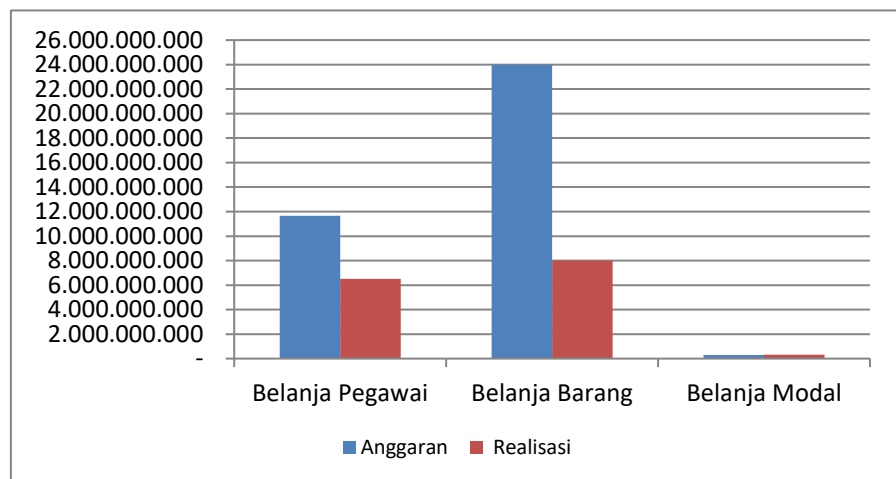
CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Rp30,490,283,123

31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30,490,283,123 atau 92.13% dari anggaran belanja sebesar Rp30,490,283,123 Sedangkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp40,969,821,578 Perbandingan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 35.35% dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.206.037.947	12.076.248.406	1,07
Belanja Barang	17.014.836.776	26.412.641.839	(35,58)
Belanja Modal	1.269.408.400	2.480.931.333	(48,83)
Total Belanja (Netto)	30.490.283.123	40.969.821.578	(25,58)



Belanja

Pegawai

Rp12.159.797.143

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.159.797.143 dan Rp13.335.392.925 Belanja Pegawai adalah belanja atas

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 53.9% dari 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pangkat dan kenaikan grade tunjangan kinerja beberapa pegawai Stasiun PSDKP Pontianak serta adanya penambahan pegawai PPPK pada Semester II Tahun 2025 sebanyak 16 orang, dan penambahan pegawai PPPK pada bulan April sebanyak 2 org.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Gaji dan Tunjangan PNS	4.931.931.885	4.778.673.200	3,21
Gaji dan Tunjangan PPPK	1.292.187.845	870.659.555	48,41
Uang Makan PNS	409.751.000	351.734.000	16,49
Uang Makan PPPK	148.398.000	75.945.000	95,40
Uang Lembur PNS	135.123.000	285.365.000	(52,65)
Uang Lembur PPPK	56.768.000	138.380.000	(58,98)
Tunjangan Kinerja PNS	4.582.032.032	4.737.016.267	(3,27)
Tunjangan Kinerja PPPK	1.207.995.185	914.420.384	32,11
Jumlah Belanja Netto (LRA)	12.764.186.947	12.152.193.406	5,04
Pengembalian Belanja Pegawai	1.883.779	926.514	-
Jumlah Belanja Bruto (Neraca)	12.766.070.726	12.153.119.920	5,04

Tidak Terdapat pengembalian belanja pegawai selama periode Januari s/d Desember 2025

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp17.014.836.776

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.014.836.776 dan Rp26.412.641.839 Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 97.66% dari Realisasi Belanja Barang TA 2025. Hal tersebut dikarenakan kerusakan mesin yang dialami oleh Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sehingga kapal tidak dapat beroperasi dan belanja operasional kapal belum dapat terealisasikan. Sebagian besar belanja barang berasal dari belanja barang non operasional yaitu belanja bahan berupa bahan bakar minyak untuk KP. Hiu Macan 001 dan KP. Hiu 11. Kapal pengawas tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 711.

Selain itu terdapat belanja barang untuk operasional perkantoran antara lain berupa pembayaran langganan daya dan jasa, honor pegawai kontrak, konsumsi rapat, atk dan komputer supplies, pemeliharaan, perjalanan dinas dan lainnya yang mendukung kegiatan operasional kantor.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	1.218.491.635	1.758.433.752	(30,71)
Belanja Barang Persediaan (5218)	68.720.500	208.484.872	(67,04)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	12.159.797.143	13.335.392.925	(8,82)
Belanja Pemeliharaan (5231)	1.938.609.659	6.573.194.621	(70,51)
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	677.776.771	3.488.434.132	(80,57)
Belanja Jasa (5221)	943.732.907	1.048.701.537	(10,01)
Jumlah Belanja Netto (LRA)	17.007.128.615	26.412.641.839	(35,61)
Pengembalian Belanja	1.883.779	8.873.700	-
Total Belanja Bruto (NERACA)	17.009.012.394	26.421.515.539	(35,62)

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Belanja Modal

Rp1.269.408.400

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.408.400 dan Rp2.480.931.333

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 90,45%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.828.000	616.398.900	(90,29)
Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin	1.209.580.400	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan		171.644.850	-
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.692.887.583	0,00
Jumlah Belanja	1.269.408.400	2.480.931.333	(48,83)
Pengembalian Belanja	0	-	-
Jumlah Belanja	1.269.408.400	2.480.931.333	(48,83)

- Speed Boat / Motor Tempel berupa pengadaan motor tempel speedboat senilai Rp 1.168.890.000 dengan SPM nomor 00837A tanggal 8 Desember 2025
- Pembelian 1 buah Mesin Pompa air PMK dengan nilai

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

perolehan Rp4.202.500 dengan SPM nomor 00872A tanggal 15 Desember 2025.

- Pembelian 2 buah Lap Top dengan nilai perolehan Rp 31.413.000 dengan SPM nomor 00360A tanggal 16 Juni 2025.
- Pembelian 1 buah Printer (Peralatan Personal Komputer) dengan nilai perolehan Rp 31.413.000 dengan SPM nomor 00828A tanggal 9 Desember 2025.
- Pembelian 1 buah Alat Tennis Meja dengan nilai perolehan Rp 3.330.000 dengan SPM nomor 00624A tanggal 29 September 2025.
- Pembelian 1 buah Reach In Freezer dengan nilai perolehan Rp 6.800.000 dengan SPM nomor 00696A tanggal 30 Oktober 2025.
- Pembelian 1 buah Rice Cooker (Alat Dapur) dengan nilai perolehan Rp1.650.000 dengan SPM nomor 00696A tanggal 30 Oktober 2025.
- Pembelian 1 buah Kursi Besi/Metal dengan nilai perolehan Rp 5.000.000 dengan SPM nomor 0710A tanggal 6 November 2025.
- Pembelian 2 buah Dispenser dengan nilai perolehan Rp 7.463.500 dengan SPM nomor 00696A tanggal 30 Oktober 2025.
- Pembelian 1 buah Dispenser dengan nilai perolehan Rp 4.171.500 dengan SPM nomor 00750A tanggal 17 November 2025.
- Pembelian 1 buah Alat Pembersih Lainnya dengan nilai perolehan Rp3.387.900 dengan SPM nomor 00872A tanggal 15 Desember 2025.
- Pembelian 1 buah A.C. Split dengan nilai perolehan Rp 4.900.000 dengan SPM nomor 00880A tanggal 12 Desember 2025.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, hal tersebut disebabkan tidak dianggarkannya belanja modal tanah pada tahun anggaran 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp1.269.408.400 dan Rp616.398,900 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2025 yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2025 dan 2024*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pompa Bensin/Minyak Transportable		6.800.000	
Sepeda Motor		61.700.000	
Mesin Bor Tangan		1.920.000	-100,00
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut		1.500.000	
Alat Ukur Sigmat		-	
Lemari Besi/Metal		5.100.000	-100,00
Rak Besi		22.800.000	
Filing Cabinet Besi		4.700.000	-100,00
Papan Pengumuman		14.300.000	
Kursi Besi/Metal		-	#DIV/0!
Kursi Fiber Glas/Plastik		1.600.000	-100,00
Mesin Cuci		9.600.000	
Alat Pembersih Lainnya		6.100.000	
Lemari Es		5.120.000	
A.C. Split		74.091.000	-100,00
Kipas Angin		-	
Chiller		3.550.000	
Kompore Gas (Alat Dapur)		-	
Televisi		17.450.000	-100,00
Loudspeaker		-	
Sound System		44.417.900	
Megaphone		-	
Camera Video		11.600.000	
Tangga Aluminium		-	
Dispenser		-	
Lampu		-	
Tempat Sampah		-	
Digital LED Running Text		5.500.000	
Camera Under Water		16.900.000	
Camera Digital		29.999.999	
Camera Conference		19.800.000	
Lap Top		109.800.000	-100,00
Tablet PC		55.100.001	-100,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)		20.050.000	-100,00
Alat Tenis Meja	3.330.000		
Lap Top	31.413.000		
Kursi Besi/Metal	5.000.000		
Alat Pembersih Lainnya	3.387.900		
A.C. Split	4.900.000		
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.700.000		
Mesin Pompa air PMK	4.202.500		
Reach In Frezzer	6.800.000		
Rice Cooker (Alat Dapur)	1.650.000		
Dispenser	4.171.500		
Dispenser	3.654.500		
Speed Boat / Motor Tempel	1.168.890.000		
Camera Conference	25.500.000		
Dispenser	3.809.000	66.900.000	
Jumlah Belanja	1.269.408.400	549.498.900	131,01
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	1.269.408.400	549.498.900	131,01

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut diperoleh dari:

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5.1. Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan

Realisasi belanja modal penambahan nilai jaringan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2025 dan 2024.

*Belanja
Bantuan Sosial*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat belanja

Rp0 bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai di Brankas		-
Uang di Rekening Bank		-
Uang Muka (Voucher)		-
Saldo BPP		-
Kwitansi UP yang belum di SPMkan		
Sub Total I	-	-
BP LS-Bendahara		
Sub Total II	-	-
Jumlah (Sub Total I - II)	-	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca		-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	-	-

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Rp0.

Piutang PNB

C.4 Piutang PNB

Rp0

Tidak terdapat saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Piutang Bukan

C.5 Piutang Bukan Pajak

Pajak Rp0

Piutang bukan pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0

Bagian Lancar

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan

TP/TGR

Rp0

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Bagian Lancar

C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA

Rp0

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Penyisihan

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp0

Terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0

Beban Dibayar

C.9 Beban Dibayar di Muka

di Muka Rp0

Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Pendapatan

yang Masih

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Harus Diterima Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per
Rp 0 tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Persediaan **C.11 Persediaan**

Rp709.325.711 Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp709.325.711 dan Rp797.126.246.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	11.398.750	17.680.750
Suku Cadang	697.926.961	779.445.496
Jumlah	709.325.711	797.126.246

Rincian mutasi transaksi persediaan pada modul pelaporan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Persediaan Habis Pakai Per 1 Januari 2025 (Saldo Awal 2025)	797.126.246
Realisasi Belanja 521811 31 Desember 2025	68.720.500
Realisasi Belanja 523123 31 Desember 2025	302.191.834
Total Realisasi Desember 2025	370.912.334
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan	0
Total	0
Saldo Awal + Total Realisasi + Total	1.168.038.580
Beban Persediaan Konsumsi	75.002.500
Beban Persediaan Suku Cadang	383.710.369
Total Beban	458.712.869
Selisih	709.325.711
Neraca 31 Desember 2025	709.325.711
Selisih	0

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

TRANSAKSI	NILAI
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2025	797.126.246
MUTASI TAMBAH	
TOTAL PEMBELIAN (pada SAKTI modul PERSEDIAAN)	370.912.334
TOTAL MUTASI TAMBAH	370.912.334
MUTASI KURANG	
BEBAN PERSEDIAAN (pada LO)	458.712.869
TOTAL MUTASI KURANG	458.712.869
SALDO AKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2024	709.325.711

Rincian mutasi transaksi pada modul persediaan adalah sebagai berikut:

SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2025	797.126.246
MUTASI TAMBAH	
M02 Pembelian	370.912.334
TOTAL MUTASI TAMBAH	370.912.334
MUTASI KURANG	
K01 Habis Pakai	458.712.869
TOTAL MUTASI KURANG	458.712.869
SALDO AKHIR PADA 30 SEPTEMBER 202	709.325.711

Mutasi tambah persediaan sebesar Rp 370.912.334 merupakan transaksi pembelian dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp 68.720.500
- Suku cadang sebesar Rp 302.191.834

Mutasi kurang persediaan sebesar Rp 458.712.869 berupa transaksi habis pakai dengan rincian:

- Barang Konsumsi sebesar Rp 75.002.500
- Suku Cadang sebesar Rp 383.710.369

Rincian persediaan periode 31 Desember 2025 adalah:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Kode	Uraian	Nilai
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	1.815.000
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	268.000
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	54.000
1.01.03.01.005	Buku Tulis	156.250
1.01.03.01.007	Penggaris	18.000
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	24.000
1.01.03.01.010	Alat Perekat	111.000
1.01.03.01.012	Staples	140.000
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	127.500
1.01.03.02.001	Kertas HVS	6.060.500
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	220.000
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	2.404.500
JUMLAH BARANG KONSUMSI		11.398.750
117114	SUKU CADANG	
1.01.02.01.003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	697.926.961
JUMLAH SUKU CADANG		697.926.961
TOTAL		709.325.711

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Fisik Persediaan Nomor : 553/PSDKPSta.4/PL.760/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp 11.398.750 terdiri dari Alat Tulis, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Penggaris, Cutter (Alat Tulis Kantor), Alat Perekat, Staples, Alat Tulis Kantor Lainnya, Kertas HVS, Berbagai Kertas, Tinta/Toner Printer. Persediaan suku cadang sebesar Rp 697.926.961 yang merupakan Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor dimana suku cadang tersebut merupakan persediaan yang berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu Macan 01, Hiu 11, Speedboat Pengawas, Rigid Inflatable Boat dan Gudang Stasiun PSDKP Pontianak yang masih ada tahun 2025.

<i>Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak terdapat nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,-.
<i>Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0</i>	C.13 Tagihan Penjualan Angsuran Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.
<i>Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0</i>	C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.
<i>Tanah Rp11.836.746.000</i>	C.15 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.836.746.000 dan Rp11.836.746.000 dengan mutasi sebesar Rp 0. Semua aset tanah digunakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebagai penunjang kegiatan di Satwas dan Wilker PSDKP yang merupakan wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Rincian Tanah Per Tanggal 31 Desember 2025

No	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	44.908	Jl. Dr. M. Hatta, Kubu Raya, Kalimantan Barat	10.543.141.000
2	552	Jl. Malindo, Entikong, Kalimantan Barat	412.867.000
3	934	Jl. Hayam Wuruk, Ketapang, Kalimantan Barat	475.509.000
4	3.431	Jl. Swadaya, Waringin Barat, Kalimantan Tengah	405.229.000
Jumlah			11.836.746.000

C.16 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp61,416,762,554

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah Rp61,416,762,554 dan Rp60.109.804.498. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp119.366.200. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	60.109.804.498
Mutasi tambah:	
Pembelian	100.518.400
Transfer masuk	18.847.800
Reklasifikasi Masuk	14.336.244.961
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.168.890.000
Perolehan lainnya	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	
Reklasifikasi Keluar	(14.336.244.961)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(184.824.482)
Saldo per 31 Desember 2025	61.213.236.216
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(72.285.040.385)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	11.071.804.169

Mutasi penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp50.260.800 diperoleh dari:

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

- Pembelian 2 buah Lap Top dengan nilai perolehan Rp 31.413.000 dengan SPM nomor 00360A tanggal 16 Juni 2025.
- Pembelian 1 buah Mesin Pompa air PMK dengan nilai perolehan Rp4.202.500 dengan SPM nomor 00872A tanggal 15 Desember 2025.
- Pembelian 2 buah Lap Top dengan nilai perolehan Rp 31.413.000 dengan SPM nomor 00360A tanggal 16 Juni 2025.
- Pembelian 1 buah Printer (Peralatan Personal Komputer) dengan nilai perolehan Rp 31.413.000 dengan SPM nomor 00828A tanggal 9 Desember 2025.
- Pembelian 1 buah Alat Tennis Meja dengan nilai perolehan Rp 3.330.000 dengan SPM nomor 00624A tanggal 29 September 2025.
- Pembelian 1 buah Reach In Freezer dengan nilai perolehan Rp 6.800.000 dengan SPM nomor 00696A tanggal 30 Oktober 2025.
- Pembelian 1 buah Rice Cooker (Alat Dapur) dengan nilai perolehan Rp1.650.000 dengan SPM nomor 00696A tanggal 30 Oktober 2025.
- Pembelian 1 buah Kursi Besi/Metal dengan nilai perolehan Rp 5.000.000 dengan SPM nomor 0710A tanggal 6 November 2025.
- Pembelian 2 buah Dispenser dengan nilai perolehan Rp 7.463.500 dengan SPM nomor 00696A tanggal 30 Oktober 2025.
- Pembelian 1 buah Dispenser dengan nilai perolehan Rp 4.171.500 dengan SPM nomor 00750A tanggal 17 November 2025.
- Pembelian 1 buah Alat Pembersih Lainnya dengan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

nilai perolehan Rp3.387.900 dengan SPM nomor 00872A tanggal 15 Desember 2025.

- Pembelian 1 buah A.C. Split dengan nilai perolehan Rp 4.900.000 dengan SPM nomor 00880A tanggal 12 Desember 2025.
- Transfer masuk sebesar (Rp18.847.800) dengan nilai buku Rp4.711.950 berupa perangkat pengolah data (laptop) Transfer masuk merupakan perpindahan aset dari Stasiun PSDKP Tahuna dengan Nomor BAST nomor 235/PSDKPSta.4/PL.450/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025.

Gedung dan

Bangunan

Rp14.586.826.318

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 14.586.826.318 dan Rp 14.402.001.836. Mutasi tambah sebesar Rp 184.824.482 terhadap Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2024. Rincian mutasi nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	14.402.001.836
Mutasi tambah:	
• Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	184.824.482
Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	-
Mutasi kurang:	
Transaksi normalisasi BMN	845.155.028
Saldo per 31 Desember 2025	15.431.981.346
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(2.313.575.640)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	13.118.405.706

Penjelasan mutasi tambah Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 13 senilai Rp 184.824.482 dengan surat keterangan koreksi pencatatan modul aset

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

tetap nomor 38/PSDKPSta.4/PL.110/I/2025 tanggal 22 Januari 2025.

- Reklasifikasi Masuk pada Rumah Negara sebanyak 8 NUP senilai Rp. 845.155.028 dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 969/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Penetapan Status Golongan Rumah Golongan I dan II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Ditjen PSDKP Pada Satker Stasiun PSDKP Pontianak, surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor 248/PSDKPSta.4/PL.760/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp
22.494.291.923*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.494.291.923 dan Rp22.153.264.709. Mutasi saldo jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	22.153.264.709
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Pengembangan Nilai Aset (langsung)	
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	22.153.264.709
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(11.152.659.028)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	11.000.605.681

C.19 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp647.298.080. Nilai tersebut diperoleh dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berupa Peta Digital sebanyak 2 buah melalui Berita Acara Serah

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Terima Nomor BA.09861/PSDKP.I/PL.430/III/2017 tanggal 2 Maret 2017.

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian mutasi KDP per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah KDP sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis KDP	Volume	Lokasi	Kontraktor	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai KDP
Jumlah								0

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp72,285,040,385*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing Rp72.285.040.385 dan Rp.70.160.999.653 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	61.416.762.554	-58.674.548.966	120.091.311.520
2	Gedung dan Bangunan	14.586.826.318	-2.457.832.391	17.044.658.709
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.494.291.923	(11.152.659.028)	33.646.950.951
4	Aset Tetap Lainnya			0
Akumulasi Penyusutan		98.497.880.795	-72.285.040.385	170.782.921.180

Aset Tak

Berwujud Rp0

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain

Rp0

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp.0

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp0

C.24 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi tersebut berasal dari akumulasi aset tak berwujud dan aset lain – lain.

Uang Muka dari

KPPN Rp0

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Persediaan yang diajukan ke KPPN sebesar Rp0 dan TUP sebesar Rp0

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp550.385.000

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp550.385.000 dan Rp.0 Rincian utang kepada pihak ketiga adalah

sebagai berikut:

- Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp550.385.000 yang merupakan belanja BBM kapal pengawas yang telah selesai pekerjaannya tanggal 29 Desember 2025 melalui BAPP.910/PPK.Sta.4/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan BAST.980/PPK.Sta.4/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 namun pembayarannya dilaksanakan di tahun anggaran 2025 dengan uraian SPM Pembayaran Perjanjian Jual Beli BBM PT.Pertamina Patra Niaga Pada Stasiun PSDKP

*Utang yang
belum Diterima
Tagihannya
Rp.42.934.871*

C.27 Utang yang belum diterima tagihannya

Tidak terdapat utang yang belum diterima tagihannya pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.42.934.871 dan Rp0. Rincian utang yang belum diterima tagihannya berupa kwitansi yang belum dibuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) adalah sebagai berikut:

- 00006T/ 440847/2026 tanggal 8 Januari 2026 sebesar Rp30.052.592
- 00016/PB/440847/2026 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp432.900
- 00015/PB/440847/2026 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp333.000
- 00014/PB/440847/2026 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp438.450
- 00013/PB/440847/2026 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp449.550
- 00012/PB/440847/2026 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp588.300
- 00011/PB/440847/2026 tanggal 13 Januari 2026

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

sebesar Rp3.502.050

- 00010/PB/440847/2026 tanggal 13 Januari 2026 sebesar Rp7.151.526

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

C.28 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.0 dan Rp0.

Ekuitas Rp36.759.368.436

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp36,759,368,468 dan Rp39,721,512,356. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPN Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp12,182,144,161

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12,182,144,161 dan Rp12,100,142,192. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok	3.618.330.000	2.819.309.800	28,34
Beban Pembulatan Gaji	53.935	43.807	23,12
Beban Tunjangan-Tunjangan	4.571.377.964	3.608.527.386	26,68
Beban Uang Makan	409.751.000	208.411.000	96,61
Beban Lembur	135.123.000	74.605.000	81,12
Jumlah Beban Pegawai (LO)	8.734.635.899	6.710.896.993	30,16
Belanja Pegawai Tahun yang Lalu			#DIV/0!
Pengembalian Belanja Pegawai			#DIV/0!
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(1.198.804.885)	(549.218.555)	-
Jumlah Beban Pegawai (Neraca)	7.535.831.014	6.161.678.438	22,30

Beban

Persediaan

Rp75.002.500

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp75.002.500 dan Rp220.149.822. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	75.002.500	220.149.822	(65,93)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya		-	-
Jumlah Beban Persediaan	75.002.500	220.149.822	(65,93)

Beban Barang

dan Jasa

Rp13.731.801.111

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.731.801.111 dan Rp16.125.720.001. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	926.611.246	1.377.076.231	-32,71
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	186.449.889	279.998.821	-33,41
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.470.500	12.054.700	-4,85
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93.960.000	89.304.000	5,21
Beban Bahan	9.503.182.053	10.791.725.358	-11,94
Beban Honor Output Kegiatan	8.780.000	27.100.000	-67,60
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.097.450.090	2.431.473.517	-13,74
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		83.294.050	-100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa	602.599.954	720.761.824	-16,39
Beban Jasa Konsultansi			
Beban Sewa	172.902.000	121.200.000	42,66
Beban Jasa Profesi		32.100.000	-100,00
Beban Jasa Lainnya	171.330.250	159.631.500	7,33
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO)	13.774.735.982	16.125.720.001	-14,58
Pembayaran Beban Tahun Lalu		56.643.787	-100,00
Pengembalian Belanja		8.061.700	
Ralat SPM			#DIV/0!
Belanja barang yang masih harus dibayar	(42.934.871)	(39.835.574)	7,78
Jumlah Beban Barang dan Jasa (NERACA)	13.731.801.111	16.142.528.214	-14,93

Beban

Pemeliharaan

Rp2.020.128.194

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp2.020.128.194 dan Rp6.522.392.242. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	236.328.822	574.042.450	(142,90)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.373.910.866	5.075.946.582	(269,45)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.646.414	294.694.683	#####
Beban Pemeliharaan Jaringan	15.531.723	69.262.550	(345,94)
Beban Persediaan Suku Cadang	383.710.369	508.445.977	(32,51)
Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)	2.020.128.194	6.522.392.242	-69,03
Utang yang belum ditagihkan			
Utang kepada pihak ketiga			
Jumlah Beban Pemeliharaan (NERACA)	2.020.128.194	6.522.392.242	-69,03

Beban Perjalanan

Dinas

Rp685.484.932

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp685.484.932 dan Rp3.488.434.132. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2025 dan 2024*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	625.316.943	2.821.908.036	-351,28
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.600.000	199.240.000	-444,37
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.859.828	108.500.000	-584,12
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	7.708.161	358.786.096	-4554,63
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)	685.484.932	3.488.434.132	-408,90
Pengembalian belanja		812.000	#DIV/0!
Utang yang belum ditagihkan			#DIV/0!
Jumlah Beban Perjalanan Dinas (NERACA)	685.484.932	3.489.246.132	-409,02

Tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas di LO dan Neraca.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.821.219.809*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.821.219.809 dan Rp1.821.223.753. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.370.453.255	2.855.314.792	- 108,35
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	162.669.118	301.790.523	- 85,52
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	288.097.436	564.827.303	- 96,05
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.821.219.809	3.721.932.618	- 104,36

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2025 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp-
376*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Nilai kegiatan non operasional sebesar Rp736 diperoleh dari:

a. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp736 yang diperoleh dari:

- Pembulatan gaji sebesar Rp504 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00020A tanggal 13 Januari 2025
- Pembulatan gaji sebesar Rp232 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00021A tanggal 14 Januari 2025.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2025 dan 2024*

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		9.318.828	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset		24.737.944	
Jumlah Pelepasan Aset Non Lancar	0	-15.419.116	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	736	48	
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	736	48	1433,33
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Kerugian Pelepasan Aset		32.811.500	-100,00
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	32.811.500	-100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	736	-48.230.568	-100,00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017.

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp39.721.512.356

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.721.512.356 dan Rp41.153.798.446

Defisit LO

(Rp30.506.220.283)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp30.506.220.283) dan (Rp42.227.001.255). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 31 Desember 2025 dan 2024.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas pencatatan klasifikasi BMN pada periode sebelumnya. Barang yang dilakukan reklasifikasi semula berupa aset

tetap peralatan dan mesin setelah dilakukan inventarisasi dapat disimpulkan bahwa BMN tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai aset tetap sebab tergolong barang habis pakai yang telah digunakan sejak BMN tersebut diperoleh, dengan nilai perolehan <Rp1.000.000. Koreksi reklasifikasi periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp0

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0.

Koreksi Nilai

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp152.958.193*

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan aset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp152.958.193 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-lain LPE

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0 dan Rp19.438. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp10.628.827.836*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir

31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.628.827.836 dan Rp Rp14.816.577.230 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	2.776.624
Ditagihkan ke Entitas Lain	(10.671.644.763)
Transfer Masuk	4.711.950
Transfer Keluar	44.752.253
Jumlah	(10.619.403.936)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 dan 2024, DDEL sebesar (Rp2.776.624) dan (Rp13.206.796), sedangkan DKEL sebesar Rp10.671.644.763 dan Rp14.829.784.026

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Keluar dengan nilai buku sebesar Rp. 44.752.253 Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk/transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 44.752.253 dan Rp0.

- Transfer masuk sebesar (Rp18.847.800) dengan nilai buku Rp4.711.950 berupa perangkat pengolah data (laptop) Transfer masuk merupakan perpindahan aset dari Stasiun PSDKP Tahuna dengan Nomor BAST

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

nomor 235/PSDKPSta.4/PL.450/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025.

- Transfer Keluar sebesar (Rp16.169.010) dengan nilai buku Rp4.042.253 berupa perangkat pengolah data (laptop) Transfer masuk merupakan perpindahan aset dari Stasiun PSDKP Tahuna dengan Nomor BAST Nomor:B.733/PSDKPSta.6/PL.930.VI/2025 Tanggal 03 Juni 2025
- Transfer Keluar Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya NUP 4 senilai (Rp271.400.000) dengan nilai buku Rp 40.710.000 dengan berita acara serah terima barang milik negara nomor 86/PSDKPSta.4/PL.450/II/2025 tanggal 24 Februari 2025.

Ekuitas Akhir
Rp37.004.521.452

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.004.521.452 dan Rp39.036.740.009

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2025 pada Stasiun PSDKP Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pejabat pengelola keuangan Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PA-KPA/PSDKPSta.4 /KU.110/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PA-KPA/PSDKPSta.4 /KU.110/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak yaitu:
 - PPK : Eko Iswahyudi, S.Pi
 - PPSPM : Rachmat Muharyakinsyah, A.Md
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Amil Maulana sesuai dengan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak Nomor 4/KPA/PSDKPSta.4/KU.110/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Pontianak.
2. Pelaksanaan revisi sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 11

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

(Sebelas) kali dengan digital stamp DIPA SP DIPA-032.05.2.440847/2025 tanggal 24 November 2024 dengan nomor digital stamp 2873-4272-0545-5000 yaitu:

- Revisi ke 1 tanggal 25 Januari 2025 dengan digital stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Direktorat Jenderal Anggaran berupa buka blokir sebesar Rp100.000.000 serta pemblokiran anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global melalui automatic adjustment (pencadangan anggaran) sebesar Rp1.991.920.000.
- Revisi ke 2 tanggal 7 Februari 2025 dengan Digital Stamp DS: 9582-0293-8129-7200 yang merupakan revisi Kanwil DJPb berupa pergeseran anggaran dengan pagu tetap dalam rangka rencana penarikan dana dengan melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA serta pemutakhiran revisi POK.
- Revisi ke 3 tanggal 22 April 2025 yang merupakan revisi Kanwil DJPb dengan digital stamp DS:2084-0506-0580-7385 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO pada Armada Pengawasan yang dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp260.556.000 yang semula akan digunakan untuk Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 menjadi penambahan anggaran untuk kegiatan Repowering Gearbox Kapal Pengawas Hiu Macan 01. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya (2353.QIC.004) berupa penambahan belanja modal dari belanja barang sebesar Rp41.196.000 yang dipergunakan untuk pembelian kelengkapan pelayanan publik.
- Revisi ke 4 tanggal 1 Mei 2025 yang merupakan revisi DJA dengan DS:2143-7527-3625-8851 berupa buka blokir melebihi RKBMN pemeliharaan sebesar Rp19.840.000.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

- Revisi ke 5 tanggal 30 Mei 2025 yang merupakan revisi kewenangan KANWIL dengan digital stamp DS:2143-7527-3625-8851 berupa pergeseran anggaran dalam satu RO Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun (2350.CBQ.001) berupa penambahan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP sebesar Rp15.000.000 serta pergeseran anggaran dalam satu RO yaitu Layanan Perkantoran berupa gaji dan tunjangan berupa pemenuhan anggaran oleh karena adanya pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK.
- Revisi DIPA ke 6 pada tanggal 9 Juli 2025 merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 3261 4542 7322 8205 yaitu Revisi antar RO/pergeseran anggaran antar RO berupa penambahan Transportasi Lokal Perkara Kelautan dan Perikanan Yang Dikenakan Sanksi Pidana sebesar Rp1.020.000, penambahan pada Perjalanan Dinas, Penambahan perjalanan dinas dan transportasi lokal pada RO Unit Usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sebesar Rp4.520.000, penambahan Tunjangan Umum PPPK sebesar Rp7.560.000, pengiriman barang Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp12.000.000 dan Atribut seragam serta plakat sebesar Rp10.500.000 dan Pemutakhiran/Perubahan Halaman 3 DIPA
- Revisi DIPA ke 7 pada tanggal 16 Oktober 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 3261 4542 7322 8205 yaitu Pergeseran anggaran dalam satu RO Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana berupa penambahan biaya Konsumsi Snack/Kudapan Penyidikan/Administrasi Penyidikan sebesar Rp750.000 dan Biaya Penyediaan keperluan awak tersangka/Kapal TPKP sebesar Rp150.000. Pergeseran anggaran dalam satu RO Unit Usaha

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan nya berupa penambahan biaya perjalanan dinas dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan unit usaha sektor Sumber Daya Perikanan sebesar Rp1.660.000, Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait sebesar Rp2.010.000 dan transportasi lokal dalam rangka pengawasan lainnya sebesar Rp2.850.000 dan penyampaian Rencana Penarikan Dana.

- Revisi DIPA ke 8 pada tanggal 24 Oktober 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 4052 8134 1416 5320 yaitu Pergeseran anggaran dalam satu RO Operasi Kapal Pengawas berupa penambahan Listrik Darat Kapal Pengawas sebesar Rp20.040.000 dan penambahan Jamuan Tamu Kapal Pengawas sebesar Rp5.984.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Operasi Speedboat Pengawas berupa penambahan biaya Docking Speedboat Pengawas 12 Meter sebesar Rp25.328.000 dan penambahan Jamuan Tamu Kapal Pengawas sebesar Rp5.984.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat berupa penambahan Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Napoleon 037 sebesar Rp2.040.000, Perawatan Darurat Speedboat Pengawas TB 01 sebesar Rp5.000.000 dan Perawatan Darurat Speedboat Pengawas Napoleon 037 sebesar Rp1.206.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan berupa penambahan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengamatan Rp5.240.000, Pergeseran anggaran dalam satu RO Layanan Perkantoran – Operasional dan Pemeliharaan Kantor berupa penambahan ATK dan Bahan Komputer sebesar Rp5.100.000, berupa penambahan biaya langganan telepon/internet sebesar Rp7.110.000, berupa penambahan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar Rp11.333.000, , berupa penambahan Pemeliharaan

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Kendaraan Roda 4 sebesar Rp12.097.000.

- Revisi DIPA ke 9 pada tanggal 19 November 2025 yang merupakan revisi kewenangan DJA dengan digital stamp 9295 9202 1768 5309 yaitu revisi relaksasasi blokir dan penghapusan blokir dari DIPA yang semula pagu awal semula adalah 35.964.014.00 menjadi 33.094.067.000.
 - Revisi DIPA ke 10 pada tanggal 9 Desember 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 9295 9202 1768 5309 yaitu Revisi pada Belanja Pegawai/51 berupa Penambahan Uang Lembur PNS sebesar Rp9.000.000, Penambahan Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp10.428.000, Penambahan Uang Lembur PPPK sebesar Rp5.068.000.
 - Revisi DIPA ke 11 pada tanggal 11 Desember 2025 yang merupakan revisi kewenangan Kanwil dengan digital stamp 9295 9202 1768 5309 yaitu Revisi Pemutakhiran Data POK Tahun Anggaran 2025 dan Revisi Antar RO pada Belanja EBA.994-002 berupa Penambahan Biaya Perawatan Laptop sebesar Rp1.740.000, Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 sebesar Rp4.719.000, Jaringan Internet dan CCTV sebesar Rp2.306.000
3. Terdapat saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Tahun 2025 yang dibayarkan di tahun 2026. SPM penampungan RPATA diterbitkan di TA 2025 dengan nomor SPM 00005A/440847/2025 tanggal 02 Januari 2026 dan SP2D nomor dengan nomor SP2D 269991302000326 sebesar Rp550.385.000 yang merupakan belanja dengan uraian SPM Pembayaran Perjanjian Jual Beli BBM PT.Pertamina Patra Niaga Pada Stasiun

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

PSDKP Pontianak TA. 2025 sesuai BAST.980/PPK.Sta.4/XII/2025 Tanggal 29-12-2025 untuk itu Per 31 Desember 2025, terdapat saldo Dana di Rekening Penampungan K/L (Akun 163139) sebesar Rp550.385.000. Saldo tersebut merupakan dana atas pekerjaan Perjanjian Jual Beli BBM PT.Pertamina Patra Niaga Pada Stasiun PSDKP Pontianak TA. 2025 yang telah diterbitkan SPM-Penampungan namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga hingga akhir tahun anggaran karena pekerjaan belum selesai 100%. "Atas saldo tersebut, telah dilakukan pelunasan/pembayaran kepada penyedia jasa pada tanggal 02 Januari 2026 dengan SP2D Nomor [269991302000326], sehingga pada periode Januari 2026 saldo akun tersebut telah nihil."

4. Berdasarkan Berita Acara Sisa Bahan Bakar Minyak Akhir Bulan Juni 2025 Kapal Pengawas Hiu Macan 01 Nomor: 317/Sta.4-HMC.01/PW.430/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 sisa Bahan Bakar Minyak sebanyak 23.000 liter dan Kapal Pengawas Hiu 11 Nomor: 939/Sta.4-HIU.11/PW.431/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 sisa Bahan Bakar Minyak sebanyak 11.600 liter. Pagu anggaran Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sebesar Rp9.139.248.000,- (sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp5.489.865.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Rupiah Murni (RM) dan berdasarkan surat nomor S-211/PB.2/2025 tanggal 4 Juli 2025 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan anggaran PNBPN yang boleh digunakan hanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari total anggaran PNBPN yang dimiliki yaitu untuk Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sebesar Rp3.649.383.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

ribu rupiah) PNBP. Realisasi anggaran Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 502.300 liter dengan nilai Rp9.137.636.000,- (sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Rp5.488.253.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Rupiah Murni (RM) dan Rp3.649.383.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) PNBP.

5. Berdasarkan Berita Acara Sisa Minyak Pelumas Akhir Bulan September 2025 Kapal Pengawas Hiu Macan 01 Nomor: 319/Sta.4-HMC.01/PW.430/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 sisa Minyak Pelumas M/E, A/E, Gearbox SAE 10W-40 sebanyak 124 liter dan Minyak Pelumas Hidraulik SAE 10 sebanyak 138 liter dan Kapal Pengawas Hiu 11 Nomor: 941/Sta.4-HIU.11/PW.431/XII/2025, tanggal 31 Desember 2025 sisa Minyak Pelumas M/E dan A/E SAE 10W-40 sebanyak 163 liter, Minyak Pelumas Gearbox SAE 30 sebanyak 94 liter dan Minyak Pelumas Hidraulik SAE 10 sebanyak 50 liter.

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

Nama Kapal	Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume BBM	Jumlah Pengisian	Pemakaian (Liter)	Tanggal BBM Akhir	Jumlah Sisa BBM
a	b	c	d	e	f	g	h = (d+e)
KP. Hiu 11	Januari	31/12/25	12.300	-	1.150	31/01/25	11.150
	Februari	31/01/25	11.150	-	350	28/02/25	10.800
	Maret	28/02/25	10.800	-	250	26/03/25	10.550
	April	26/03/25	10.550	-	200	28/04/25	10.350
	Mei	28/04/25	10.350	20.000	19.900	31/05/25	10.450
	Juni	31/05/25	10.450	12.000	13.000	30/06/25	9.450
	Juli	30/06/25	9.450	14.000	11.350	31/07/25	12.100
	Agustus	31/07/25	12.100	14.000	14.050	31/08/25	12.050
	September	31/08/25	12.050	12.000	11.500	30/09/25	12.550
	Oktober	30/09/25	12.550	18.000	27.500	31/10/25	3.050
	November	31/10/25	3.050	43.000	39.600	30/11/25	6.450
	Desember	30/11/25	6.450	50.000	44.850	31/12/25	11.600
KP. Hiu Macan 01	Januari	31/12/25	19.200	-	1.500	31/01/25	17.700
	Februari	31/01/25	17.700	-	1.200	28/02/25	16.500
	Maret	28/02/25	16.500	13.000	14.400	26/03/25	15.100
	April	26/03/25	15.100	15.000	2.300	29/04/25	27.800
	Mei	29/04/25	27.800	26.000	45.600	31/05/25	8.200
	Juni	31/05/25	8.200	22.000	24.100	30/06/25	6.100
	Juli	30/06/25	6.100	-	900	31/07/25	5.200
	Agustus	31/07/25	5.200	25.000	20.000	31/08/25	10.200
	September	31/08/25	10.200	52.000	33.000	29/09/25	29.200
	Oktober	29/09/25	29.200	16.000	29.600	31/10/25	15.600
	November	31/10/25	15.600	60.000	69.600	01/12/25	6.000
	Desember	01/12/25	6.000	90.300	73.300	31/12/25	23.000

6. Sampai dengan saat ini 30 juni 2025 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp2.775.888 dengan rincian:

- Penjualan peralatan komputer, perabot kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp2.775.888 dengan NTPN E83ACONAODEJ64SF dan NTB 097479705158 tanggal 22 Januari 2025 melalui risalah lelang nomor 9/11.01/2025-01 tanggal 20 Januari 2025.
- Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp736 yang dibayarkan melalui nomor SPM 00020A tanggal 13 Januari 2025 dan nomor SPM 00021A tanggal 14 Januari 2025.

7. Sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat bangunan yang

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung IMB tersebut telah berubah menjadi SLF (Surat Laik Fungsi) yaitu seluruh bangunan yang berada di Pontianak dan Wilker PSDKP Ketapang. Untuk SLF Kantor Wilker PSDKP Ketapang sampai dengan pelaporan telah berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ketapang dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan SLF. Sedangkan untuk Kantor Pontianak batas tanah secara digital dari BPN tidak sesuai eksistingnya yang terbit di dalam sertifikat tanah Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, sehingga permasalahan tersebut sedang diajukan oleh Biro Hukum KKP ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

8. Sesuai dengan Rencana Aksi Tindak Lanjut rekomendasi BPK RI lingkup Ditjen PSDKP Nomor 1092/PSDKP.1/TU.210/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, yakni terkait temuan BPK RI atas LK KKP periode TA 2010 – 2021 yakni BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan KPB terkait supaya menginput bukti kepemilikan yang sah atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, pada Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 65 NUP senilai Rp56.647.948.442 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 64 NUP senilai Rp56.587.948.422 sehingga sampai dengan tanggal pelaporan masih tersisa sebanyak 1 NUP senilai Rp60.000.000 berupa speedboat/motor tempel yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 yang masih belum ditindak lanjuti. Hal tersebut disebabkan motor tempel tersebut merupakan bagian dari sekoci yang terdapat pada Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kapal Pengawas Hiu Macan 01 sehingga tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah dari

CALK STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

mesin tempel tersebut.

9. Aset yang telah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Dalam Proses Pengajuan (Rp)
1	Tanah	11.836.746.000	-	-
2	Peralatan dan Mesin	61.502.082.704	-	69.105.400
3	Gedung dan Bangunan	13.741.671.290	-	-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.494.291.923	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
TOTAL		110.419.946.945	-	69.105.400

Dalam proses Pengelola Barang, Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN sebanyak 12 NUP senilai Rp69.105.400 sesuai nota dinas nomor 429/PSDKPSta.4/PL.710/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Stasiun PSDKP Pontianak terdapat pada fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan rincian sebagaimana terlampir :

CALC STASIUN PSDKP PONTIANAK SEMESTER II 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Pemantauan, Operasi Amada dan Infrastruktur Pengawasan	227.269.616.000	231.830.508.000	199.683.455.944	0	199.683.455.944	86,13	32.147.052.056
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	3.592.610.000	1.352.190.000	1.336.805.610	0	1.336.805.610	98,86	15.384.390
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	12.495.518.000	4.139.520.000	4.138.862.448	0	4.138.862.448	99,98	657.552
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	5.600.000.000	0	0	0	0	null	0
	JUMLAH PROGRAM Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	248.957.744.000	237.322.218.000	205.159.124.002	0	205.159.124.002	86,45	32.163.093.998
WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	327.263.724.000	290.564.640.000	285.082.987.662	33.908.022	285.049.079.640	98,1	5.515.560.360
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	327.263.724.000	290.564.640.000	285.082.987.662	33.908.022	285.049.079.640	98,11	5.515.560.360
	JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	576.221.468.000	527.886.858.000	490.242.111.664	33.908.022	490.208.203.642	92,87	37.678.654.358
	JUMLAH FUNGSI EKONOMI	576.221.468.000	527.886.858.000	490.242.111.664	33.908.022	490.208.203.642	92,87	37.678.654.358

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1300
SATUAN KERJA : 440847
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN BARAT
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 02/05/26 10:04 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 2/5/26 8:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,007,071,000	3,621,675,000	3,621,673,200	218,000	3,621,455,200	99.99	219,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51,000	55,000	53,935	649	53,286	96.88	1,714
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	311,913,000	310,808,000	310,806,740	21,800	310,784,940	99.99	23,060
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	97,972,000	98,924,000	98,921,634	8,720	98,912,914	99.99	11,086
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	14,040,000	14,040,000	0	14,040,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	80,360,000	87,560,000	87,560,000	1,080,000	86,480,000	98.77	1,080,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	19,500,000	18,503,000	18,502,465	0	18,502,465	100	535
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	241,304,000	237,104,000	237,103,080	0	237,103,080	100	920
511129	Belanja Uang Makan PNS	580,800,000	415,980,000	409,751,000	111,000	409,640,000	98.48	6,340,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	141,540,000	134,960,000	134,960,000	0	134,960,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,493,111,000	4,939,609,000	4,933,372,054	1,440,169	4,931,931,885	99.84	7,677,115
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	715,346,000	924,197,000	924,196,100	0	924,196,100	100	900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	17,000	16,661	0	16,661	98.01	339
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	48,014,000	64,219,000	64,218,680	0	64,218,680	100	320
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,895,000	18,023,000	18,022,844	0	18,022,844	100	156
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	63,000,000	54,600,000	54,600,000	0	54,600,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	47,652,000	62,861,000	62,860,560	0	62,860,560	100	440
511628	Belanja Uang Makan PPPK	104,808,000	149,838,000	148,398,000	0	148,398,000	99.04	1,440,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	19,875,000	19,875,000	0	19,875,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	992,729,000	1,293,630,000	1,292,187,845	0	1,292,187,845	99.89	1,442,155
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	278,299,000	135,503,000	135,123,000	0	135,123,000	99.72	380,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	34,320,000	57,222,000	56,768,000	0	56,768,000	99.21	454,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	312,619,000	192,725,000	191,891,000	0	191,891,000	99.57	834,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,932,423,000	4,582,476,000	4,582,475,642	443,610	4,582,032,032	99.99	443,968
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	938,877,000	1,207,996,000	1,207,995,185	0	1,207,995,185	100	815
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	5,871,300,000	5,790,472,000	5,790,470,827	443,610	5,790,027,217	99.99	444,783
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,669,759,000	12,216,436,000	12,207,921,726	1,883,779	12,206,037,947	99.91	10,398,053
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1300
SATUAN KERJA : 440847
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN BARAT
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 02/05/26 10:04 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 2/5/26 8:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,575,496,000	927,362,000	926,611,246	0	926,611,246	99.92	750,754
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	310,460,000	186,940,000	186,449,889	0	186,449,889	99.74	490,111
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,300,000	11,471,000	11,470,500	0	11,470,500	100	500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72,552,000	93,960,000	93,960,000	0	93,960,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,989,808,000	1,219,733,000	1,218,491,635	0	1,218,491,635	99.9	1,241,365
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	12,975,081,000	12,297,204,000	10,053,567,053	0	10,053,567,053	81.75	2,243,636,947
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	14,980,000	11,480,000	8,780,000	0	8,780,000	76.48	2,700,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,042,659,000	2,174,159,000	2,097,450,090	0	2,097,450,090	96.47	76,708,910
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	22,995,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	15,055,715,000	14,482,843,000	12,159,797,143	0	12,159,797,143	83.96	2,323,045,857
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	228,000,000	69,366,000	68,720,500	0	68,720,500	99.07	645,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	228,000,000	69,366,000	68,720,500	0	68,720,500	99.07	645,500
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	574,196,000	463,711,000	463,645,497	0	463,645,497	99.99	65,503
522112	Belanja Langganan Telepon	200,760,000	123,825,000	122,920,610	0	122,920,610	99.27	904,390
522113	Belanja Langganan Air	18,600,000	13,245,000	12,934,550	0	12,934,550	97.66	310,450
522141	Belanja Sewa	206,936,000	172,925,000	172,902,000	0	172,902,000	99.99	23,000
522151	Belanja Jasa Profesi	48,300,000	0	0	0	0	0	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	217,142,000	181,297,000	171,330,250	0	171,330,250	94.5	9,966,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,265,934,000	955,003,000	943,732,907	0	943,732,907	98.82	11,270,093
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485,180,000	236,336,000	236,328,822	0	236,328,822	100	7,178
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,107,700,000	1,374,800,000	1,373,910,866	0	1,373,910,866	99.94	889,134
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	370,000,000	302,209,000	302,191,834	0	302,191,834	99.99	17,166
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	49,690,000	10,650,000	10,646,414	0	10,646,414	99.97	3,586
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	12,730,000	15,561,000	15,531,723	0	15,531,723	99.81	29,277
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,025,300,000	1,939,556,000	1,938,609,659	0	1,938,609,659	99.95	946,341
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,839,952,000	764,993,000	625,316,943	0	625,316,943	81.74	139,676,057
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	155,150,000	47,550,000	36,600,000	0	36,600,000	76.97	10,950,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	128,000,000	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	313,946,000	96,468,000	15,859,828	0	15,859,828	16.44	80,608,172

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1300
SATUAN KERJA : 440847
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN BARAT
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 02/05/26 10:04 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 2/5/26 8:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,437,048,000	933,011,000	677,776,771	0	677,776,771	72.64	255,234,229
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	8,500,000	7,708,161	0	7,708,161	90.68	791,839
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	8,500,000	7,708,161	0	7,708,161	90.68	791,839
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	24,001,805,000	19,608,012,000	17,014,836,776	0	17,014,836,776	86.77	2,593,175,224
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292,450,000	60,000,000	59,828,000	0	59,828,000	99.71	172,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,209,619,000	1,209,580,400	0	1,209,580,400	100	38,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	292,450,000	1,269,619,000	1,269,408,400	0	1,269,408,400	99.98	210,600
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	292,450,000	1,269,619,000	1,269,408,400	0	1,269,408,400	99.98	210,600
	JUMLAH BELANJA	35,964,014,000	33,094,067,000	30,492,166,902	1,883,779	30,490,283,123	92.13	2,603,783,877

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (440847) STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Tgl Data : 02/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 10:01 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	39,721,512,356	41,153,798,446	(1,432,286,090)	(3.48)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(33,056,148,968)	(42,227,001,255)	9,170,852,287	(21.72)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(346,677,348)	(169,228,367)	(177,448,981)	104.86
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(346,677,348)	(169,247,805)	(177,429,543)	104.83
LAIN-LAIN	0	19,438	(19,438)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	30,440,682,396	40,963,943,532	(10,523,261,136)	(25.69)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,962,143,920)	(1,432,286,090)	(1,529,857,830)	106.81
EKUITAS AKHIR	36,759,368,436	39,721,512,356	(2,962,143,920)	(7.46)

Keterangan :

FINAL

KUBU RAYA, 2 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAYU YUNIARTO SUHARTO

NIP 198506162007011003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (440847) STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Tgl Data : 02/05/26 7:35 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 10:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	11,398,750	0
0.0	117114	Suku Cadang	697,926,961	0
0.0	131111	Tanah	11,836,746,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	61,416,762,554	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	14,586,826,318	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,086,678,000	0
0.0	134112	Irigasi	10,955,175,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,452,438,923	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	60,185,172,085
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,620,501,512
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	3,767,825,193
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	7,110,721,979
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	557,428,430
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	550,385,000	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	42,934,871
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	550,385,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	30,490,283,123
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	9,560,424	0
0.0	313211	Transfer Keluar	44,752,253	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	4,711,950
0.0	391111	Ekuitas	0	39,721,512,356
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	346,677,348	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,559,688
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	736
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,618,112,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	53,286	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	310,690,220	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	98,875,026	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	86,350,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,502,465	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	237,103,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	409,640,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	134,960,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	924,196,100	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	16,661	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	64,218,680	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	18,022,844	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (440847) STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Tgl Data : 02/05/26 7:35 AM

Tgl Cetak : 02/05/26 10:03 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

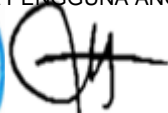
KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	54,600,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	62,860,560	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	148,398,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	19,875,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	135,123,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	56,768,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,570,934,354	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,198,804,885	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	926,611,246	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	186,449,889	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,470,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	93,960,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	10,053,567,053	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,780,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,097,450,090	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	468,014,359	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	121,651,045	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,934,550	0
3.0	522141	Beban Sewa	172,902,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	171,330,250	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	236,328,822	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,373,910,866	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10,646,414	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	15,531,723	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	625,316,943	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,600,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15,859,828	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	7,708,161	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,881,076,374	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	325,338,239	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	225,927,383	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	303,850,174	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	41,636,453	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	75,002,500	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	383,710,369	0
JUMLAH			145,061,036,923	145,061,036,923

Keterangan :

FINAL



KUBU RAYA, 2 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAYU YUNIARTO SUHARTO
NIP 198506162007011003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (440847) STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Tgl Data : 02/05/26 7:35 AM
Tgl Cetak : 02/05/26 10:00 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	320	(320)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	320	(320)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	320	(320)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	12,182,144,161	12,100,142,192	82,001,969	0.678
Beban Persediaan	75,002,500	220,149,822	(145,147,322)	(65.931)
Beban Barang dan Jasa	14,325,120,982	16,125,720,001	(1,800,599,019)	(11.166)
Beban Pemeliharaan	2,020,128,194	6,522,392,242	(4,502,264,048)	(69.028)
Beban Perjalanan Dinas	685,484,932	3,488,434,132	(2,802,949,200)	(80.35)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (440847) STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK

Tgl Data : 02/05/26 7:35 AM
Tgl Cetak : 02/05/26 10:00 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,777,828,623	3,721,932,618	55,896,005	1.502
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	33,065,709,392	42,178,771,007	(9,113,061,615)	(21.606)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(33,065,709,392)	(42,178,770,687)	9,113,061,295	(21.606)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	9,559,688	(15,419,116)	24,978,804	(161.999)
Pendapatan Pelepasan Aset	9,559,688	9,318,828	240,860	2.585
Beban Pelepasan Aset	0	24,737,944	(24,737,944)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	736	(32,811,452)	32,812,188	(100.002)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	736	48	688	1,433.333
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	32,811,500	(32,811,500)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9,560,424	(48,230,568)	57,790,992	(119.822)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(33,056,148,968)	(42,227,001,255)	9,170,852,287	(21.718)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(33,056,148,968)	(42,227,001,255)	9,170,852,287	(21.718)

Keterangan :

FINAL

KUBU RAYA, 2 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAYU YUNIARTO SUHARTO
NIP 198506162007011003